

**PENGAKOMODASIAN PENGARUSUTAMAAN HAK ANAK
DALAM PUTUSAN PENJARA PIDANA ANAK
(Analisis Putusan No. 4/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Sbs dan
No.15/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Pdg)**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I
pada Jurusan Hukum Fakultas Hukum**

Oleh:

SETYA NINGRUM

C100150147

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2020

HALAMAN PERSETUJUAN

**PENGAKOMODASIAN PENGARUSUTAMAAN HAK ANAK DALAM
PUTUSAN PENJARA PIDANA ANAK**

**(Analisis Putusan No.4/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Sbs dan No.15/Pid.Sus-
Anak/2015/PN.Pdg)**

PUBLIKASI ILMIAH

oleh:

SETYA NINGRUM

C 100 150 147

Telah Diperiksa dan Disetujui Untuk Diuji Oleh:

Dosen
Pembimbing



(Kuswardani, S.H., M.Hum)
NIK/NIDN. 471/0618026302

HALAMAN PENGESAHAN

**PENGAKOMODASIAN PENGARUSUTAMAAN HAK ANAK DALAM
PUTUSAN PENJARA PIDANA ANAK**

**(Analisis Putusan No.4/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Sbs dan No.15/Pid.Sus-
Anak/2015/PN.Pdg)**

**OLEH
SETYA NINGRUM
C 100 150 147**

**Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada hari Selasa, 7 Januari 2020
dan dinyatakan telah memenuhi syarat**

Dewan Penguji:

- 1. Kuswardani, S.H., M.Hum
(Ketua Dewan Penguji)**
- 2. M. Iksan, S.H., M.H
(Anggota I Dewan Penguji)**
- 3. Hartanto, S.H., M.H
(Anggota II Dewan Penguji)**

(.....)
(.....)
(.....)

**Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta**



**Prof. Dr. H. Khudzaifah Dimyati, S.H., M.Hum
NIK. 537/NIDN. 0727085803**

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam publikasi ilmiah ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kersajanaan di suatu perguruan tinggi dan sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya diatas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 5 Januari 2020

Penulis



SETYA NINGRUM

C100150147

**PENGAKOMODASIAN PENGARUSUTAMAAN HAK ANAK DALAM
PUTUSAN PENJARA PIDANA ANAK
(Analisis Putusan No.4/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Sbs dan No.15/Pid.Sus-
Anak/2015/PN.Pdg)**

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui mengenai Pengakomodasian pengarusutamaan hak anak dalam putusan penjara pidana anak dan Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan penjara pidana anak . Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan isi putusan dan jenis data sekunder dengan penelitian yang menggunakan Putusan Nomor 04/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Sbs dan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Pdg. Hasil penelitian dari penelitian ini bahwa pengakomodasian pengarusutamaan Hak Anak (PUHA) dalam putusan penjara pidana anak terdapat dalam penjatuhan hukuman oleh hakim dan dasar pertimbangan hakim dalam putusan penjara pidana anak yaitu kepentingan terbaik bagi anak sebagai pertimbangan utama.

Kata Kunci: pengarusutamaan hak anak, anak berhadapan dengan hukum, pidana anak

Abstract

The purpose of this study was to find out about the accommodating of the mainstreaming of children's rights in a child criminal prison ruling and the judge's basic considerations in passing a child criminal ruling. This research is a type of normative legal research using the decision content approach method and secondary data types with research using Decision Number 04 / Pid.Sus-Anak / 2015 / PN.Sbs and Number 15 / Pid.Sus-Anak / 2015 / PN.Pdg . The results of this study indicate that the mainstreaming of the Rights of the Child (PUHA) in the decision of a child criminal prison is contained in sentencing by the judge and the basic consideration of the judge in the decision of a child criminal prison is the best interest for children as the main consideration.

Keywords: mainstreaming the rights of the child, children confronting the law, criminal children

1. PENDAHULUAN

Pengarusutamaan hak anak yang selanjutnya disingkat PUHA merupakan strategi pelaksanaan perlindungan anak dengan mengintegrasikan hak anak dalam peraturan perundangan, kebijakan, program, kegiatan dan anggaran, mulai dari tahap perencanaan hingga pada monitoring dan evaluasi, yang dimulai dengan rencana Pembangunan jangka panjang dan menengah (RPJMN) 2004-2009. Capaian dari pelaksanaan PUHA adalah adanya penghormatan, pemenuhan, dan

perlindungan anak, yang kesemuanya itu harus ada dalam semua mitra kehidupan yang berhubungan dengan anak, termasuk dalam penegakan hukum.

Satjipto Raharjo dalam bukunya yang berjudul *Masalah Penegakan Hukum* menyatakan bahwa penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi (kebijakan) yang membuat keputusan hukum tidak secara ketat diatur oleh undang-undang melainkan juga berdasarkan kebijaksanaan antara hukum dan etika. Oleh karena itu, pertimbangan secara nyata hanya diterapkan selektif dalam masalah penanggulangan kejahatan (Setiadi dan Kristian, 2017).

Dalam penegakan hukum, hakim mempunyai peranan atau pengaruhnya yang sangat besar dalam menjatuhkan hukuman, dan diharapkan memberikan suatu keadilan dalam proses peradilan pidana, sehingga dengan demikian akan terwujud suatu kepastian hukum dalam proses peradilan pidana itu sendiri (Anwar dan Adang, 2009).

Sifat pemidanaan bagi anak yang berkonflik dengan hukum bukanlah semata-mata hanya bersifat *punitif* (menghukum) maupun mencari-cari kesalahan anak tetapi untuk memperbaiki anak dengan menghindarkannya dari perbuatan-perbuatan yang asosial. Selain itu usaha-usaha pemidanaan anak harus *non viktimasi* (jangan menimbulkan korban terhadap anak tersebut) baik yang nonstruktural (fisik) maupun struktural (sosial) (Dwitamara, 2013).

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) Pasal 71 ayat (1) huruf e, Pidana Penjara merupakan bagian dari pidana pokok yang terakhir bagi anak sebagai pelaku tindak pidana. Ditegaskan pula dalam Pasal 81 ayat (5) UU SPPA bahwa pidana penjara terhadap anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir. Pada dasarnya sanksi pidana yang diberikan kepada anak harus lebih bersifat mendidik dan membina anak kearah kehidupan yang lebih baik, agar menjadi anggota masyarakat yang patuh kepada hukum. Sifat sanksi atau tindakan bagi anak harus berbeda dengan sifat sanksi pidana bagi orang dewasa.

Adapun permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: *Pertama*, bagaimana pengakomodasian pengarusutamaan hak anak (puha) dalam putusan penjara pidana anak (analisis Putusan No.4/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Sbs dan No.15/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Pdg)? *Kedua*, apakah yang menjadi dasar

pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan penjara pidana anak (analisis Putusan No.4/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Sbs dan No.15/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Pdg)?

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengarusutamaan hak anak yang diimplementasikan dalam putusan penjara pidana anak dan mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam putusan penjara pidana anak.

Kerangka pemikiran mengenai Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA) (Pengarusutamaan Hak Anak – *Mainstreaming Children Rights*) sebagai suatu strategi dipandang mampu memastikan bahwa pembuatan peraturan perundang-undangan, kebijakan, program dan kegiatan berikut anggarannya akan berpihak kepada pemenuhan prinsip-prinsip hak anak. PUHA yang dimaksudkan disini adalah menjadikan pemenuhan hak anak sebagai pertimbangan utama dari para pengambil keputusan dan perencana pembangunan nasional, propinsi dan kabupaten/kota. Apabila hal ini dilaksanakan, diharapkan bahwa kepedulian mengenai hak anak akan semakin meningkat dan kemudian pemenuhan hak-hak mereka sebagai sesama warga negara juga akan semakin cepat terjamin (Raharjo dkk, 2008).

2. METODE

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan dengan hukum normatif. Penelitian normatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat (Ali, 2015). Dalam penulisan penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang merupakan prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau menuliskan keadaan subjek atau objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta yang tampak (Soerjono dan Rahman, 2003). Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis data sekunder, data sekunder sendiri berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta mengkaji putusan pengadilan nomor 04/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Sbs dan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Pdg. Metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu

studi kepustakaan dan studi hukum. Sementara teknis analisis data menggunakan analisis kualitatif.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Pengakomodasian PUHA (Pengarusutamaan Hak Anak) Dalam Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Sbs Dan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Pdg

Pada hakikatnya setiap anak memiliki hak yang melekat padanya atas kelangsungan hidup dan tumbuh kembang, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-undang Dasar 1945 yang menerangkan bahwa “*Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang...*”. Oleh karena itu, sanksi-sanksi yang diberikan kepada anak sebagai pelaku tindak pidana sedapat mungkin dihindarkan dari penjatuhan sanksi pidana yang dapat membatasi kebebasan anak, memberikan pencelaan terhadap anak dalam kehidupannya di masyarakat, yang sedikit banyak melanggar hak anak untuk tumbuh dan berkembang.

Dalam putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Sbs Hakim Pengadilan Negeri Sambas menjatuhkan sanksi tindakan berupa pengembalian kepada orangtua. Sanksi tindakan tersebut menunjukkan bahwa ada sarana lain selain pidana sebagai penanggulangan kejahatan yang dilakukan oleh anak. Sanksi pidana yang bersifat merampas kebebasan dan kemerdekaan anak harus menjadi sarana paling terakhir yang diberikan kepada anak yang melakukan tindak pidana (*ultimum remedium*). Pada prinsipnya tindakan merupakan sanksi yang tidak membalas. Hal ini semata-mata ditujukan pada prefensi khusus yaitu melindungi masyarakat dan ancaman yang dapat merugikan kepentingannya. Tindakan yang diberikan tersebut bukan suatu hukuman yang sifatnya menderitakan, tetapi mendidik dan mengayomi. Dengan demikian anak terdakwa akan memperoleh didikan dan binaan dari orangtua sekaligus juga mendapatkan pengawasan dari Pembimbing Kemasyarakatan. Sanksi tindakan yang dijatuhkan kepada anak terdakwa tersebut menunjukkan bahwa dalam putusan tersebut telah mengakomodasikan prinsip kepentingan terbaik bagi anak guna memenuhi hak anak untuk tumbuh dan berkembang.

Penerapan prinsip nondiskriminasi dalam putusan tersebut juga terlihat dengan tidak adanya bentuk kerugian materiil atau moril yang anak terdakwa derita sampai pada putusan tersebut dibacakan. Artinya bahwa tidak adanya diskriminasi dalam penanganan perkara tersebut baik pembedaan dari asal-usul anak terdakwa, suku, ras, golongan, agama, status hukum, politik, dan sosial ekonomi.

Meskipun Anak terdakwa didakwa telah melakukan perbuatan pidana, namun Anak terdakwa masih memiliki hak untuk didengar pendapatnya terutama mengenai kehidupannya. Oleh karena itu, hakim memberikan ruang terhadap anak terdakwa untuk menyampaikan keterangan mengenai tindak pidana yang dilakukannya. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip penghargaan terhadap pendapat anak terpenuhi dengan diberikannya kesempatan anak terdakwa menyampaikan keterangannya untuk didengar dan dijadikan sebagai pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara.

Berdasarkan fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan pada putusan tersebut bahwa anak Terdakwa sebelumnya sudah pernah melakukan pencurian di rumah saksi korban, namun dalam perkara tersebut telah diselesaikan dengan cara kekeluargaan. Hal itu menunjukkan bahwa ada upaya diversifikasi yang telah dilakukan dengan cara musyawarah antara korban dengan anak yang berkonflik hukum untuk menyelesaikan masalah anak.

Pada hakikatnya cara perlakuan khusus bagi anak yang berkonflik hukum dengan cara diversifikasi juga menjadi penyeimbang atas berlakunya prinsip *ultimum remedium*, agar anak tidak perlu diproses melalui persidangan. Akan tetapi sudah cukup dengan jalan perdamaian antara pelaku dan korban.

Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak-anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak terlantar, anak yang diperdagangkan atau anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental. Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum salah satunya adalah perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi. Labelisasi penting dihindarkan bagi anak yang melakukan

tindak pidana, karena cap jahat atau stigma jahat akan melekat terus walaupun yang bersangkutan tidak melakukan kejahatan lagi. Stigmatisasi tersebut dapat dihindari apabila dilakukan diversi (pengalihan). Dengan diversi maka anak dihindarkan akan proses peradilan formal, dan tidak ada pencatatan kejahatan pada anak tersebut. Sebagaimana dalam putusan ini bahwa orang terkait baik pelaku, korban maupun saksi merupakan anak di bawah umur, sehingga dalam proses hukumnya pun anak yang terlibat dalam perkara dirahasiakan identitasnya dengan penyebutan seperti “TERDAKWA I, TERDAKWA II, SAKSI IV, dan SAKSI KORBAN”. Disebutkan pula dalam Pasal 17 ayat (2) UU RI No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Pasal 19 (1) UU RI No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa Setiap anak yang menjadi korban, pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan. Hal tersebut bertujuan untuk melindungi kepentingan anak

Selama proses hukum berjalan Anak ditahan dengan jenis penahanan rutin. Penahanan yang dilakukan tersebut sebenarnya tidak sejalan dengan prinsip *puha* yaitu prinsip kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, karena jelas dengan adanya penahanan tersebut kebebasan anak dibatasi. Selain itu juga perlakuan buruk seringkali masih terjadi ketika anak berada dalam Tahanan (RUTAN) maupun Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS), perlakuan tersebut berupa pemalakan atau bentuk eksploitasi lainnya. Pada banyak kasus kekerasan semacam ini dilakukan oleh para tahanan/Napi anak dan dewasa ditempatkan dalam sel yang terpisah. Kenyataan tersebut menunjukkan Rutan/Lapas memberikan pengaruh buruk terhadap anak-anak tidak saja sebagai akibat dari pergaulannya dengan sesama perilaku kriminal lainnya baik anak maupun dewasa, tetapi juga berupa pengalamannya terhadap kekerasan baik fisik maupun seksual. maka diperlukan berbagai upaya alternatif penyelesaian masalah anak yang berkonflik dengan hukum, selain dari pada melalui sistem peradilan pidana anak. Hal ini sejalan dengan prinsip yang dianut *Convention of The Right of The Child* (CRC) dan juga sebagaimana telah diadopsi dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak khususnya menyangkut prinsip “*The Best Interest of The Child*” dan Pidana sebagai “*The Last Resort*”.

Prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest for the child*) merupakan salah satu prinsip utama perlindungan anak sesuai dengan semangat Konvensi Hak Anak (KHA) semestinya menjadi acuan dan pijakan bagi setiap pihak dalam menangani dan menyelesaikan kasus anak sebagai pelaku tindak pidana, KHA secara eksplisit menyatakan bahwa dalam semua tindakan mengenai anak yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial negara atau swasta, pengadilan hukum penguasa administratif atau badan legislatif, kepentingan-kepentingan terbaik anak harus merupakan pertimbangan utama.

Penahanan anak bukan merupakan jalan utama dalam rangka perbaikan moral anak. Pidana perampasan kemerdekaan terhadap anak hanya memberikan efek trauma yang mendalam pada diri anak. Penjatuhan pidana perampasan kemerdekaan terhadap seorang anak pelaku kejahatan harus dilakukan oleh hakim sebagai hal ultimum remedium, pilihan terakhir, dan hanya untuk kepentingan anak. Bagaimanapun penjara bukan tempat yang baik bagi anak. Di sisi lain hakim harus memperhatikan keseimbangan dan tuntutan keadilan dari masyarakat yang terkena dampak kejahatan. Upaya paksa (penahanan, perampasan hak-hak tertentu) jika tidak mengganggu proses peradilan pidana selayaknya tidak dilakukan.

Merujuk pada sanksi pidana penjara yang diancamkan bagi pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak berupa pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.0000.000,- (lima milyar rupiah), anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali terpidana sebelum waktu percobaan selama 1(satu) tahun berakhir telah bersalah melakukan tindak pidana, dengan syarat khusus supaya anak menjalani pembinaan di luar lembaga selama 10 (sepuluh) bulan dan pelatihan kerja selama 2 (dua) bulan.

Menurut Paulus Hadisuprpto (2003: 124), bahwa penjatuhan pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana cenderung merugikan perkembangan jiwa anak di masa mendatang. Kecenderungan merugikan ini akibat dari efek penjatuhan pidana terutama pidana penjara yang berupa stigma (*cap jahat*). Dikemukakan juga oleh Barda Nawawi Arief (1994: 47), pidana penjara dapat

memberikan stigma yang akan terbawa terus walaupun yang bersangkutan tidak melakukan kejahatan lagi. Akibat penerapan stigma bagi anak akan membuat mereka sulit kembali menjadi anak baik.

Kendati dalam putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Pdg hakim juga telah melanggar prinsip pidana sebagai “*The Last Resort*”, yang menempatkan sanksi pidana sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*), namun dalam petimbangannya hakim tetap mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak. Sebab meskipun Anak terdakwa dijatuhi pidana penjara, tetap berhak memperoleh pendidikan dan pembinaan dari Lembaga Pemasyarakatan Anak. Oleh karena itu, hakim memerintahkan anak supaya menjalani pembinaan dan latihan kerja di Lembaga Unit Pelaksanaan Tekhnis Daerah (UPTD) Panti Sosial Asuh Anak dan Bina Remaja (PSAABR) Budi Utomo Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman. Dengan demikian meski hak anak untuk tumbuh dan berkembang tidak sepenuhnya terpenuhi tetapi anak masih memiliki bekal untuk kelangsungan hidupnya dimasa depan.

3.2 Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Sbs Dan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Pdg

Pertama, Dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan penjara Pidana Anak Nomor 04/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Sbs menyatakan bahwa perbuatan terdakwa YASER bin JAWARI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP yang berbunyi “Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) barangsiapa yang mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”. Unsur barang siapa adalah unsur yang menunjuk pada subjek hukum atau pelaku, yang dimaksud subjek hukum dalam unsur ini adalah orang yang melakukan tindak pidana yang mampu bertanggungjawab dan/ dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam perkara ini YASER bin JAWARI adalah orang yang mampu bertanggungjawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya. Pada putusan tersebut Terdakwa tidak dapat dikenai hukuman berupa pidana, berdasarkan ketentuan Pasal 69 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan anak belum berusia 14 tahun

hanya dapat dikenai tindakan. Oleh karena itu, hakim memberikan sanksi berupa tindakan yaitu pengembalian kepada orang tua. Kendati demikian anak tetap memperoleh pengawasan dari Pembimbing Kemasyarakatan. Pada dasarnya sanksi pidana yang bersifat pembalasan dijadikan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*), hukuman yang diberikan kepada anak berkonflik hukum lebih kepada mendidik dan membina demi masa depan anak agar dikemudian hari tidak melakukan perbuatannya lagi. Hal itulah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara yang mengesampingkan sanksi pidana demi kepentingan terbaik anak. Meninjau dari pertimbangan hakim secara umum maka hal ini dapat dilihat ketika hakim memberikan putusan tindakan terhadap terdakwa yang didasarkan dengan pertimbangan hakim terhadap hal-hal yang patut untuk tidak diselesaikan dengan penjatuan pidana penjara. Dengan demikian, hakim berpendapat putusan tindakan akan memberikan upaya preventif agar pelaku tidak mengulangi perbutannya di masa depan, dan memberikan pandangan kepada korban bahwa pidana penjara untuk melakukan upaya pembalasan yang dilakukan terhadap terdakwa menjadi tidak berguna karena jika didasarkan pada keadilan restoratif akan meminimalisir upaya balas dendam sehingga putusan tindakan yang dijatuhkan oleh hakim merupakan solusi terbaik terdakwa maupun korban.

Kedua, Dalam mempertimbangkan sanksi pidana penjara terhadap anak yang melakukan tindak pidana turut serta melakukan perbuatan cabul perlu mendapat perhatian khusus, sebab putusan hakim pada peradilan anak harus mengutamakan pemberian bimbingan edukatif serta pembinaan moral terhadap anak, disamping tindakan yang bersifat menghukum. meskipun terdakwa anak dijatuhi pidana penjara, tetap berhak memperoleh pendidikan serta pembinaan dalam Lembaga Permasyarakatan Anak. Hakim Pengadilan Negeri Padang menjatuhkan sanksi pidana khususnya pidana penjara dengan pertimbangan yang sangat kasuistis namun juga dikarenakan anak terdakwa sudah berumur lebih dari 12 tahun, ketidak mampuan orangtua untuk mendidik dan mengawasi anak dengan keadaan anak yang tidak bersekolah lagi, dan memperhatikan pula saran dari Balai Pembimbing Kemasyarakatan (BAPAS) dalam laporan penelitiannya yang menginginkan agar anak mendapatkan pembinaan dan pengawasan yang lebih ketat sehingga anak tidak melakukan tindak pidana lagi dan diharapkan pula

anak terdakwa merasakan efek jera dari sanksi pidana yang diberikan. Pertimbangan lain Majelis Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana, dikarenakan jenis tindak pidananya termasuk tindak pidana dengan ancaman pidana lebih dari 5 tahun yaitu tindak pidana turut serta melakukan perbuatan cabul dan akibat perbuatan anak terdakwa tersebut menyebabkan selaput dara korban robek dan hamil sudah duabelas minggu sehingga merusak masa depan korban. Putusan pidana penjara tersebut sungguh tidak mencerminkan adanya prinsip *ultimum remedium*. Pada dasarnya prinsip ini menjelaskan hukuman pidana hanya digunakan sebagai upaya terakhir. Sanksi pidana merupakan “obat terakhir” (*ultimum remedium*) dari rangkaian tahapan penegakan suatu aturan hukum. “Obat terakhir” ini merupakan jurus pamungkas jika mekanisme penegakan pada bidang hukum lain tidak bekerja efektif. Namun, dalam perkembangan hukum pidana di Indonesia, sanksi pidana dalam beberapa kasus tertentu bergeser kedudukannya. Sehingga dalam hal ini sangat tidak mudah untuk menerapkan prinsip *ultimum remedium* dalam menjatuhkan putusan pidana. Meskipun demikian seorang hakim dalam memutus suatu perkara anak tetap harus mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak. Seperti halnya dalam putusan ini Anak Terdakwa yang melakukan perbuatan pidana turut serta melakukan perbuatan cabul dijatuhkan pidana bersyarat dengan pertimbangan bahwa anak terdakwa yang berstatus ex. Pelajar yaitu pembinaan di luar lembaga selama 10 (sepuluh) bulan dan juga menjatuhkan pelatihan kerja selama 2 (dua) bulan di Lembaga Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (UPTD) Panti Sosial Asuh Anak dan Bina Remaja (PSAABR) Budi Utomo Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. Dengan demikian, sanksi pidana yang awalnya bersifat pembalasan, namun menjadi upaya rehabilitatif dan bersifat edukatif terhadap anak terdakwa.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Pertama, Pengakomodasian Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA) dalam putusan penjara pidana anak yang penulis ambil sebenarnya sudah cukup baik. Terutama pada Pengakomodasian Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA) dalam putusan

nomor 4/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Sbs, yang mengakomodasikan semua prinsip *puha* dalam proses peradilannya. Yaitu menjatuhkan sanksi tindakan terhadap anak terdakwa sebagai wujud penerapan dari prinsip-prinsip pengarusutamaan hak anak. Sedangkan dalam Putusan nomor 15/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Pdg, tidak mengakomodasikan semua prinsip *puha* dalam proses peradilannya yang meenjatuhhkan sanksi pidana penjara terhadap anak terdakwa jelas telah melanggar pidana sebagai “*The Last Resort*” dan juga prinsip kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak.

Kedua, dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan penjara pidana anak pada putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Sbs yang memberikan sanksi tindakan berupa pengembalian kepada orangtua tidak lain demi kepentingan terbaik bagi anak dan juga sebagai wujud pengesampingan sanksi pidana sebagai upaya terakhir dalam memutus perkara anak. sedangkan dalam putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Pdg hakim menjatuhkan sanksi pidana penjara terhadap anak terdakwa dengan pertimbangan bahwa demi kepentingan terbaik anak yang membutuhkan pembinaan dan pelatihan meskipun sanksi pidana tersebut telah jelas melanggar prinsip *ultimum remedium* yang menjadikan pidana sebagai obat terakhir dalam memutus perkara anak.

4.2 Saran

Kepada Hakim agar dalam menjatuhkan putusan benar-benar mengakomodasikan pengutamakan hak anak (PUHA) dan menjadikan PUHA sebagai pertimbangan utama dalam setiap pengambilan keputusan mengenai anak yang melakukan tindak pidana baik berdasarkan prinsip hak atas kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, prinsip non-diskriminasi, prinsip kepentingan terbaik bagi anak, dan prinsip penghargaan terhadap pendapat anak.

Kepada masyarakat umum dan para orang tua pada khususnya hendaknya berperan serta aktif dalam rangka usaha penanggulangan kejahatan dan bersifat selektif terhadap hal-hal yang baru serta melakukan pengawasan terhadap anak-anak serta lingkungan sehingga tidak ada kesempatan untuk terjadinya suatu tindak pidana.

Kepada pembentuk Undang-undang hendaknya dibentuk suatu peraturan perundang-undangan yang memuat sanksi berat bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual karena dalam hal ini korban masih dibawah umur.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainudin. (2015). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika
- Anwar, Yesmil dan Adang. (2009). *Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen, & Pelaksanaannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia*. Bandung: Widya Padjadjaran.
- Dwitamara, Tresilia. (2013). *Pengaturan dan Implementasi mengenai Hak Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Indonesia*, Perspektif, Vol XVIII, No.2, [https://www.researchgate.net/publication/312461104_Pengaturan Dan Implementasi Mengenai Hak Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Indonesia Studi di Pengadilan Negeri Surabaya dan Rumah Tahanan Medaeng](https://www.researchgate.net/publication/312461104_Pengaturan_Dan_Implementasi_Mengenai_Hak_Anak_Yang_Berkonflik_Dengan_Hukum_Di_Indonesia_Studi_di_Pengadilan_Negeri_Surabaya_dan_Rumah_Tahanan_Medaeng), diunduh 25 April 2019, pukul 23.15 WIB
- Konvensi Hak Anak Nomor 36 Tahun 1990
- Raharjo, Budi. dkk. (2008). *“Konsep dan Pengertian PUHA”*. Kementrian Negara Pemberdayaan Perempuan, Jakarta, <http://perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/opac/themes/bappenas4/templateDetail.jsp?id=100458&lokasi=lokal>, diunduh 14 Mei 2019, pukul 10.05 WIB
- Setiadi, Edi dan Kristian. (2017). *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia group.
- Soerjono & Abdul Rahman. (2003). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)